

**RENCANA AKSI KINERJA
 TAHUN 2017**

**Nama/Unit Organisasi : SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH
 Tahun : 2017**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksana
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya Pembinaan Pertanggung jawaban Perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan keuangan	100%	Mengikuti Rapat Kerja Perbendaharaan di Jakarta (Menunggu Undang-undang Kegiatan KPU RI)					Mg.II								Rp. 31.527.000	Sub Bagian Keuangan
2	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	Rekonsiliasi Tahunan dan semesteran peserta operator SAIBA dan SIMAK Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah	Mg.I						Mg.I						Rp. 70.389.000	Sub Bagian Keuangan

		Petunjuk pengelolaan keuangan dilingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah	100%	-															
3	Tersusunnya Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	100%	Akan dilaksanakan Bimtek LPPA oleh Tim dari Biro Keuangan Bag.Verifikasi KPU RI peserta Bendahara/ Operator LPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah	Mg. IV	Mg. IV	Mg. IV	Mg. IV	Rp. 32.734.000	Sub Bagian Keuangan									
4	Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Tingkat Satker dalam Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase pola pengelolaan Logistik Pemilu ditingkat Satker	100%	Menunggu Juknis Tahun 2017										Mg. III				Rp. 36.023.000	Sub Bagian Logistik
5	Terlaksananya Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	100%	Menunggu Undangan Kegiatan KPU RI							Mg.III							Rp. 38.275.000	Sub Bagian Logistik
6	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL	100%	Penyusunan Renja dan RKAKL TA. 2018										Mg.II				Rp. 69.322.000	Sub Bagian Program dan Data
7	Terselenggaranya Rencana Aksi dan Percepatan Penyerapan Anggaran	Persentase Penyerapan Anggaran	95%	Supervisi dan Monitoring ke KPU Kabupaten/Kota Dalam Rangka Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017						Mg.II	Mg.III							Rp. 17.500.000	Sub Bagian Program dan Data
8	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan	Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam DPT	90%	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan Tahun 2017 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah							Mg.II							Rp. 35.604.000	Sub Bagian Program dan Data

9	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	Persentase KPU Provinsi yang mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal BB	90%	Rapat Penyusunan Rencana Aksi dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta Laporan Kinerja Tahun 2016		Mg.IV												Rp. 74.411.000	Sub Bagian Program dan Data	
11	Terlaksananya Diklat Struktural	Layanan peningkatan Kompetensi SDM	90%	Diklat PIM IV				Mg.II	Mg.II	Mg.II	Mg.II							Rp. 70.320.000	Sub Bagian Organisasi dan SDM	
12	Tersedianya Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	90%	<ul style="list-style-type: none"> •Menunggu Undangan Kegiatan KPU RI •KGB •Mutasi •Kepangkatan 		Mg.II						Mg.II						Rp. 37.529.000	Sub Bagian Organisasi dan SDM	
		Terlaksananya ketatalaksanaan SDM	90%				Mg.II													
		Terlaksananya penataan SDM	90%		Mg.I			Mg.I												
13	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase pengadministrasian BMN KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota ke dalam aplikasi SIMAK	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Menunggu Juknis Tahun 2017 • Menunggu Undangan Kegiatan KPU RI 	Mg.IV	Rp. 4.700.000	Sub Bagian Umum													
14	Meningkatnya Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	100%	Menunggu Undangan Kegiatan KPU RI			Mg.IV				Mg.IV			Mg.IV			Mg.IV	Rp. 36.161.000	Sub Bagian Umum	
15	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	100%	Kebutuhan sehari-hari Perkantoran	Mg.I	Rp. 629.919.000	Sub Bagian Umum													
17	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mobelair/ Elektronik Kantor KPU	100%	Kebutuhan sehari-hari Perkantoran	Mg.I	Rp. 629.919.000	Sub Bagian Umum													

18	Meningkatnya Pengembangan Gedung/Bangunan di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Terlaksananya Pengembangan Gedung/Bangunan KPU Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Rehap Gedung KPU Provinsi Sulawesi Tengah				Mg.I	Mg.I									Rp. 205.000.000	Sub Bagian Umum
19	Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	100%	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring permasalahan Hukum Rapat kerja persiapan pelaksanaan Pilkada di Sulteng 	Mg.II													Rp. 19.500.000	Sub Bagian Hukum
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan /opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	100%		Mg.II														
20	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Hukum dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	100%	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi JDIH Menunggu Undangan Kegiatan KPU RI 	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Rp. 22.351.000	Sub Bagian Hukum
21	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pemilu	Jumlah Penyelenggara yang mengikuti kegiatan Raker/Rakor Pembekalan Penyuluhan PKPU	100%	<ul style="list-style-type: none"> Menunggu Undangan Kegiatan KPU RI Rapat Evaluasi Kegiatan Penyuluhan PKPU 			Mg.II	Mg.II	Mg.II	Mg.II	Mg.II	Mg.II	Mg.II	Mg.II	Mg.II	Mg.II	Mg.II	Rp. 69.754.000	Sub Bagian Hukum
22	Meningkatnya Publikasi Informasi Pemilu	Tersedianya Informasi Pemilu yang Akurat	100%	Menunggu Undangan Kegiatan KPU RI	Mg.III	Mg.III	Mg.III				Mg.II	Mg.II	Mg.II					Rp. 73.556.000	Sub Bagian Tekhnis
23	Meningkatnya Kualitas PPID	Persentase Informasi yang disampaikan melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Menunggu Undangan Kegiatan KPU RI	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV	Mg.IV								Rp. 9.779.000	Sub Bagian Tekhnis

24	Tersedianya Dokumen Penataan Daerah Pemilihan Pasca Pemilu	Jumlah daerah pemilihan dan alokasi kursi serta Peta Wilayah Pemilu 2019	100%	Menunggu Undangan Kegiatan KPU RI	Mg.I	Mg.I	Mg.I							Mg.I	Mg.I	Mg.I	Rp. 20.368.000	Sub Bagian Tekhnis
5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Pemilih	Jumlah KPU Provinsi yang membentuk Pusat Pendidikan Pemilih (Rumah Pintar)	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Menunggu Undangan Kegiatan KPU RI • Mengundang 4 Komunitas Peduli Pemilu • Melaksanakan kegiatan sejumlah 30 orang • Alat/perlengkapan pembentukan Rumah Pintar Pemilu, Komputer, TV dan Audio Visual, LCD Projector, Panel Materi 				Mg.II	Mg.II	Mg.II	Mg.II	Mg.II	Mg.II				Rp. 321.037.000	Sub Bagian Tekhnis

Palu, 3 Juli 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



[Handwritten Signature]
M. H. NUR BAKTI

NIP. 19600925 198603 1 009

**TABEL PEMANTAUAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2017
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (Bulan Januari s.d Maret)	CAPAIAN (%)	ANALISIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)*100%	(7)
1	Tersedianya Data Pemilih yang Akurat dan Terkini	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	25	23	92	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional pada kegiatan ini telah melakukan pemantauan pengisian aplikasi SIDALIH Se Sulawesi Tengah. • Pengukuran disesuaikan dengan progres <i>updating</i> data SIDALIH secara berkelanjutan 13 (tiga belas) KPU Kabupaten/Kota, ada 5 (lima) yang datanya kurang <i>update</i>. • Rekomendasi : kesulitan mendapatkan data terkini dari Dukcapil, Rakor Nasional yang melibatkan Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota. • Memasukkan operator Dukcapil sebagai bagian dari Tim Pokja/Kegiatan di KPU.
2	Persentase Layanan Pengadaan/Pengelolaan Logistik Pemilu /Pemilihan	Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	25	24	96	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional yakni persiapan pelaksanaan Rakor Logistik. • Telah membentuk ULP Tingkat Provinsi dan melakukan pembinaan satker KPU Kabupaten/Kota. • Pengukuran disesuaikan dengan porsi anggaran, penyerapan TW.I pelaksanaan teknis. • Rekomendasi : Bimtek terpadu pengelolaan BMN (Eks logistik Pemilu) yang baik.

3	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek dalam rangka Peningkatan Kompetensi	10	10	100	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional pada kegiatan ini mengajukan personil yang direncanakan mengikuti Diklat PIM IV. • Mengikuti Bimtek aplikasi Kepegawaian dan secara rutin mengimplementasi inputan data kepegawaian. • Mengikuti Rakornas SDM dan mensosialisasikan ke tingkat KPU Kabupaten/Kota. • Koordinasi tentang tata laksana SDM. • Rekomendasi : menambah plafon anggaran Diklat dimaksud, mengingat banyaknya pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat PIM terkait Se Sulawesi Tengah. • Pengukuran disesuaikan dengan porsi anggaran, penyerapan TW.I pelaksanaan teknis.
4	Tersedianya/Terpeliharanya Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran	25	23	92	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional dengan Pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan kantor secara berkala. • Melakukan survei kebutuhan sarana dan prasarana mobilair/elektronik • Pengukuran disesuaikan dengan porsi anggaran, penyerapan TW.I pelaksanaan teknis.
5	Tersedianya Informasi Hukum yang memadai dan Penyuluhannya	Persentase Penyediaan dan Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya	0	0	0	-
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	80	77	96,25	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional pada kegiatan ini telah menyelenggarakan Rakor Se Sulawesi Tengah penyusunan PK dan LKj, dan mengikuti Rapimnas di Cipanas Jawa Barat serta menindaklanjuti hasil Rapimnas. • Melakukan monitoring progres PK. • Pengukuran disesuaikan dengan porsi anggaran, penyerapan TW.I pelaksanaan teknis.

7	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan	Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi	20	19	95	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional pada kegiatan ini berupa Rekonsiliasi yang telah diselenggarakan untuk bahan LK Semester II Tahun 2016. • Koordinasi pengelolaan keuangan yang berpedoman dengan Juknis dan peraturan yang ada. Dilakukan melalui media baik internet/email, konsultasi langsung melalui telp baik internal KPU dan intansi keuangan terkait. • Penyusunan LPPA melalui aplikasi SIMONIKA pada bulan Februari diselenggarakan Bimtek SIMONIKA Se Sulawesi Tengah selanjutnya penginputan masing-masing Satker per bulan. • Pengukuran dilihat dari progres pengisian LPPA SIMONIKA <i>online</i> dan disesuaikan dengan porsi anggaran, penyerapan TW.I pelaksanaan kegiatan serta disesuaikan dengan koordinasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan keuangan. • Rekomendasi : Pelatihan terpadu untuk pelaku penyusun Laporan Keuangan yang andal KPU. • Sosialisasi lebih awal terhadap aturan keuangan terbaru.
---	--	---	----	----	----	---

Palu, 3 April 2017

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



MOH NUR BAKTI

Lampiran 1 Surat Sekretaris Jenderal KPU RI
 Nomor : 760/SJ/VII/2017
 Tanggal : 6 Juli 2017

**TABEL PEMANTAUAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2017
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (Bulan Januari s.d Maret)	CAPAIAN (%)	ANALISIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)*100%	(7)
1	Tersedianya Data Pemilih yang Akurat dan Terkini	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	25	24	96	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional pada kegiatan ini telah mengikuti Rakornas DPT berkelanjutan dan mensosialisasikan hasilnya ke KPU Kabupaten/Kota. Pengukuran disesuaikan dengan progres updating data SIDALIH secara berkelanjutan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota, ada 5 (lima) yang datanya kurang <i>update</i>. Rekomendasi : kesulitan mendapatkan data terkini dari Dukcapil, Rakor Nasional yang melibatkan Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota. Memasukkan operator Dukcapil sebagai bagian dari Tim Pokja/Kegiatan di KPU.
2	Persentase Layanan Pengadaan/Pengelolaan Logistik Pemilu /Pemilihan	Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	25	24	96	<ul style="list-style-type: none"> Definisi Operasional pada kegiatan ini telah menyelenggarakan Rakor Logistik. Melakukan pembinaan pada satker KPU Kabupaten/Kota. Pengukuran disesuaikan dengan porsi anggaran, penyerapan TW.II pelaksanaan teknis. Rekomendasi : Bimtek terpadu pengelolaan BMN (Eks logistik Pemilu) yang baik.

3	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek dalam rangka Peningkatan Kompetensi	10	10	100	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional pada kegiatan ini telah mengikutkan 2 (dua) Pejabat Eselon IV pada Diklat PIM IV. • Progres <i>database</i> dalam aplikasi kepegawaian Se Sulawesi Tengah. • Rekomendasi : menambah plafon anggaran Diklat dimaksud, mengingat banyaknya pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat PIM terkait Se Sulawesi Tengah. • Pengukuran disesuaikan dengan porsi anggaran, penyerapan TW.II pelaksanaan teknis.
4	Tersedianya/Terpeliharanya Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran	25	23	92	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional dengan Pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan kantor secara berkala. • Melakukan survei kebutuhan sarana dan prasarana <i>mobelair/ elektronik</i> • Pengukuran disesuaikan dengan porsi anggaran, penyerapan TW.II pelaksanaan teknis.
5	Tersedianya Informasi Hukum yang memadai dan Penyuluhannya	Persentase Penyediaan dan Penyediaan Dokumentasi, Informasi Hukum dan Penyuluhannya	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional : telah dibentuk JDIH yang <i>link</i> dengan JDIH KPU RI yang mempunyai data dan informasi yang terkini. • Rekomendasi : agar KPU Kabupaten/Kota difasilitasi untuk pembentukan JDIH yang <i>link</i> pula dengan KPU RI.
6	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	80	78	97,5	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional pada kegiatan ini telah monitoring dan supervisi progres PK Kabupaten/Kota terdekat. • Pengukuran disesuaikan dengan porsi anggaran, penyerapan TW.II dan progres PK.

7	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan	Persentase Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Provinsi	20	19	95	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional pada kegiatan ini berupa persiapan rekon untuk bahan LK Semester I Tahun 2017. • Koordinasi pengelolaan keuangan yang berpedoman dengan Juknis dan peraturan yang ada. Dilakukan melalui media baik internet/email, konsultasi langsung melalui telp baik internal KPU dan instansi keuangan terkait. • Penyusunan LPPA lewat penginputan masing-masing satker per bulan dalam aplikasi SIMONIKA. • Pengukuran dilihat dari progres pengisian LPPA SIMONIKA <i>online</i> dan disesuaikan dengan porsi anggaran, penyerapan TW.I pelaksanaan kegiatan serta disesuaikan dengan koordinasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan keuangan. • Rekomendasi : Pelatihan terpadu untuk pelaku penyusun Laporan Keuangan yang andal KPU • Sosialisasi lebih awal terhadap aturan keuangan terbaru.
---	--	---	----	----	----	---

Palu, 3 Juli 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH NUR BAKTI